



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ Nomor 02/XII/SEB/2010 Tanggal 28 Desember 2010, Perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA.2011 Huruf B angka 1 point j yang menyatakan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan belum menganggarkan Dana BOS yang bersumber dari transfer Pemerintah, maka daerah dapat melaksanakan kegiatan BOS mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA.2011, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir perubahan dan penambahan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 Tanggal 11 Februari 2011, Perihal Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 Tanggal 22 Juni 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, Romawi IV Hal-Hal Khusus angka 6 yang menyatakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengakomodir perubahan dan penambahan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 Tanggal 12 Juni 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2011;
 29. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 900/5106/SJ Nomor 02/XII/SEB/2010 Tanggal 28 Desember 2010, Perihal Pedoman Pengelolaan Dana BOS dalam APBD TA.2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Organisasi Dinas Kesehatan, dan Bidang Organisasi PPKD diubah sehingga Pasal 1 dan Lampiran II Bidang Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Organisasi Dinas Kesehatan, dan Bidang Organisasi PPKD berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 20.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 806.197.298.242,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 195.353.194.800,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.021.550.493.042,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja pegawai	Rp. 597.091.406.193,00
2. Belanja hibah	Rp. 27.623.343.000,00
3. Belanja bantuan sosial	Rp. 8.525.000.000,00
4. Belanja Bagi Hasil Pada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	Rp. 500.000.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 67.000.000.000,00
6. Belanja tidak terduga	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 701.739.749.193,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp. 60.876.429.233,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 214.557.259.534,00
3. Belanja Modal	Rp. 148.798.150.133,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 424.231.838.900,00
Jumlah belanja	Rp 1.125.971.588.093,00
Surplus/(Defisit)	Rp (104.421.095.051,00)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp. 106.671.095.051,00
b. Pengeluaran	Rp. 2.250.000.000
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp 104.421.095.051,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran	
Tahun berkenaan	Rp 0,00

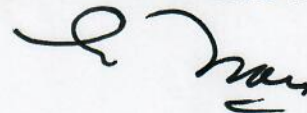
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 18 April 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN-DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011, NOMOR : 12
BERITA

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS I	
3.	ASS. II	
4.	ASS-III	
5.	DPeKAD.	
6.	BAG. HKM	
7.		
8.		

Lampiran II : Peraturan Bupati
 Nomor : 12 Tahun 2011
 Tanggal 13 April 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG APBD
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
 ORGANISASI : 1.20.00.- PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	909,369,751,042.00	1,001,550,493,042.00	92,180,742,000.00	10.14	
1.20.1.20.00.00.00.4.2.	DANA PERIMBANGAN	806,197,298,242.00	806,197,298,242.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	105,814,398,242.00	105,814,398,242.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Pajak	64,928,497,839.00	64,928,497,839.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	55,813,645,678.00	55,813,645,678.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,956,917,684.00	5,956,917,684.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	3,157,934,477.00	3,157,934,477.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	40,885,900,403.00	40,885,900,403.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	18,772,800.00	18,772,800.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	241,448,692.00	241,448,692.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	40,370,171,000.00	40,370,171,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.	Bagi Hasil Cukai dari Tembakau	255,507,911.00	255,507,911.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum	637,844,600,000.00	637,844,600,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	637,844,600,000.00	637,844,600,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU).	637,844,600,000.00	637,844,600,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	62,538,300,000.00	62,538,300,000.00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	62,538,300,000.00	62,538,300,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK).	62,538,300,000.00	62,538,300,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103,172,452,800.00	195,353,194,800.00	92,180,742,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	22,247,500,000.00	22,247,500,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	22,247,500,000.00	22,247,500,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	121,000,000.00	121,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	121,000,000.00	121,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.	Bagi Hasil dari Taman Nasional Way Kambas	5,500,000.00	5,500,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80,924,952,800.00	173,105,694,800.00	92,180,742,000.00	113.91	
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian	80,924,952,800.00	173,105,694,800.00	92,180,742,000.00	113.91	
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Guru	73,163,596,800.00	73,163,596,800.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana Penyesuaian Kesehatan	7,761,356,000.00	7,761,356,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.	Dana BOS					
	Dana Penyesuaian Infrastruktur		67,727,742,000.00	67,727,742,000.00		
	Daerah (DPID) Kesehatan					
1.20.1.20.00.00.00.5.	BELANJA DAERAH		24,453,000,000.00	24,453,000,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	94,455,510,000.00	104,648,343,000.00	10,192,833,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah	94,455,510,000.00	104,648,343,000.00	10,192,833,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17,430,510,000.00	27,623,343,000.00	10,192,833,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Pemerintah Pusat	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah Sarana & Prasarana Desa	1,401,510,000.00	1,401,510,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	1,401,510,000.00	1,401,510,000.00			
		10,729,000,000.00	20,921,833,000.00	10,192,833,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Lembaga - Lembaga Semi Pemerintah	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Lembaga Lembaga Pendidikan	200,000,000.00	200,000,000.00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Lembaga Lembaga Koperasi	489,000,000.00	489,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Kepada Lembaga Lembaga Keagamaan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Kepada Organisasi	3,240,000,000.00	3,240,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Dana BOS kepada Sekolah Swasta					
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	10,192,833,000.00		
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.	Hibah Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Miskin	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial					
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8,525,000,000.00	8,525,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial kepada Rumah Ibadah	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat	6,625,000,000.00	6,625,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500,000,000.00	500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	500,000,000.00	500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pasar	500,000,000.00	500,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67,000,000,000.00	67,000,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	66,055,000,000.00	66,055,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan	66,055,000,000.00	66,055,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	945,000,000.00	945,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik	945,000,000.00	945,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga.	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			
	JUMLAH BELANJA	94,455,510,000.00	104,648,343,000.00			
-	SURPLUS/(DEFISIT)	814,914,241,042.00	896,902,150,042.00			

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	DP2 KAD
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

Sukadana, 18 April 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR


SATONO

Peraturan Bupati
Nomor
Tanggal

Lampiran II :

: 12 Tahun 2011
: 18 April
Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

URUSAN PEMERINTAH : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN

ORGANISASI : 1.01.02. DINAS KESEHATAN

Nomor Urut <i>I</i>	Uraian <i>2</i>	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan <i>7</i>
		Sebelum Perubahan <i>3</i>	Setelah Perubahan <i>4</i>	(Rp) <i>5</i>	% <i>6</i>	
5 2	BELANJA LANGSUNG	21,574,470,000	46,027,470,000	24,453,000,000	113.34	
1 02 01 25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya		24,453,000,000	24,453,000,000	100	
1 02 01 25 07	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya		12,034,385,000	12,034,385,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai					
5 2 1 01	Honorarium PNS		16,250,000	16,250,000	100	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		16,250,000	16,250,000	100	
5 2 1 01 03	Honorarium Pengelola Keuangan		5,000,000	5,000,000	100	
5 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		9,300,000	9,300,000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		1,950,000	1,950,000	100	
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		18,135,000	18,135,000	100	
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor		3,775,000	3,775,000	100	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		775,000	775,000	100	
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor		3,000,000	3,000,000	100	
5 2 2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman lelang		8,000,000	8,000,000	100	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas		8,000,000	8,000,000	100	
5 2 2 15 02	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah		6,360,000	6,360,000	100	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 3	Belanja Modal					
5 2 3 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		12,000,000,000	12,000,000,000	100	
5 2 3 19 01	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum		12,000,000,000	12,000,000,000	100	
1 02 01 25 12	Kegiatan Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap		5,083,715,000	5,083,715,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai		34,715,000	34,715,000	100	
5 2 1 01	Honorarium PNS		34,715,000	34,715,000	100	
5 2 1 01 01	Honor Tim Pelaksana Kegiatan		1,740,000	1,740,000	100	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		20,250,000	20,250,000	100	
5 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		8,750,000	8,750,000	100	
5 2 1 03	Uang Lembur		3,975,000	3,975,000	100	
5 2 1 03 01	Uang lembur PNS		3,975,000	3,975,000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		249,000,000	249,000,000	100	
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		3,000,000	3,000,000	100	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		3,000,000	3,000,000	100	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas		6,000,000	6,000,000	100	
5 2 2 15 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		6,000,000	6,000,000	100	
5 2 2 21	Belanja jasa konsultansi		240,000,000	240,000,000	100	
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan		144,000,000	144,000,000	100	
5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan		96,000,000	96,000,000	100	
5 2 3	Belanja Modal		4,800,000,000	4,800,000,000	100	
5 2 3 26	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan		4,800,000,000	4,800,000,000	100	
5 2 3 26 10	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pelayanan kesehatan		4,800,000,000	4,800,000,000	100	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 01 25 13	Kegiatan Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas		1,592,400,000	1,592,400,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai		13,000,000	13,000,000	100	
5 2 1 01	Honorarium PNS		13,000,000	13,000,000	100	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		8,000,000	8,000,000	100	
5 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		5,000,000	5,000,000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa			-		
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		79,400,000	79,400,000	100	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		2,000,000	2,000,000	100	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas			-		
5 2 2 15 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2,400,000	2,400,000	100	
5 2 2 21	Belanja jasa konsultansi			-		
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan		75,000,000	75,000,000	100	
5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan		45,000,000	45,000,000	100	
5 2 3	Belanja Modal		30,000,000	30,000,000	100	
5 2 3 26	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan			-		
5 2 3 26 10	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pelayanan kesehatan		1,500,000,000	1,500,000,000	100	
1 02 01 25 26	Kegiatan Pembangunan Pos Kesehatan Desa		1,500,000,000	1,500,000,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai		646,600,000	646,600,000	100	
5 2 1 01	Honorarium PNS		10,800,000	10,800,000	100	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		10,800,000	10,800,000	100	
5 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		4,550,000	4,550,000	100	
			6,250,000	6,250,000	100	
				-		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		35,800,000	35,800,000	100	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		2,200,000	2,200,000	100	
			2,200,000	2,200,000	100	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas			-	100	
5 2 2 15 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		3,600,000	3,600,000	100	
			3,600,000	3,600,000	100	
5 2 2 21	Belanja jasa konsultasi			-		
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultasi perencanaan		30,000,000	30,000,000	100	
5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultasi pengawasan		18,000,000	18,000,000	100	
			12,000,000	12,000,000	100	
5 2 3	Belanja Modal			-		
5 2 3 26	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan		600,000,000	600,000,000	100	
5 2 3 26 10	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pelayanan kesehatan		600,000,000	600,000,000	100	
1 02 01 25 27	Kegiatan Rehabilitasi Berat Puskesmas		215,450,000	215,450,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai					
5 2 1 01	Honorarium PNS		3,250,000	3,250,000	100	
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		3,250,000	3,250,000	100	
5 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		2,000,000	2,000,000	100	
			1,250,000	1,250,000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa			-		
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		212,200,000	212,200,000	100	
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		1,000,000	1,000,000	100	
			1,000,000	1,000,000	100	
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas			-		
5 2 2 15 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1,200,000	1,200,000	100	
			1,200,000	1,200,000	100	
5 2 2 20	Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan/Gedung			-		
			200,000,000	200,000,000	100	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Penjelasan	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
						(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5 2 2 20 03	Belanja Pemeliharaan/Rehab. Bangunan/Gedung Sarana Kesehatan		200,000,000		200,000,000	100
5 2 2 21	Belanja jasa konsultansi		10,000,000		10,000,000	100
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan		6,000,000		6,000,000	100
5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan		4,000,000		4,000,000	100
1 02 01 25 28	Kegiatan Renovasi Puskesmas		4,880,450,000		4,880,450,000	100
5 2 2 1	Belanja Pegawai					
5 2 2 1 01	Honorarium PNS		34,000,000		34,000,000	100
5 2 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		34,000,000		34,000,000	100
5 2 2 1 01 05	Honorarium Pemeriksa Barang		24,000,000		24,000,000	100
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa		10,000,000		10,000,000	100
5 2 2 01	Belanja bahan habis pakai		241,450,000		241,450,000	100
5 2 2 01 02	Belanja dokumen/administrasi tender		4,000,000		4,000,000	100
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas					
5 2 2 15 01	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah		7,200,000		7,200,000	100
5 2 2 21	Belanja jasa konsultansi		7,200,000		7,200,000	100
5 2 2 21 02	Belanja jasa konsultansi perencanaan		230,250,000		230,250,000	100
5 2 2 21 03	Belanja jasa konsultansi pengawasan		138,150,000		138,150,000	100
5 2 3	Belanja Modal		92,100,000		92,100,000	100
5 2 3 26	Belanja Modal pengadaan konstruksi bangunan		4,605,000,000		4,605,000,000	100
5 2 3 26 10	Belanja Modal pengadaan konstruksi gedung pelayanan kesehatan		4,605,000,000		4,605,000,000	100

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	DPKAD
6.	BAG. HKM
7.	
8.	

Sukadana, 18 April 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR

SATONO

SATONO

Lampiran II : Peraturan Bupati
Nomor : 12 Tahun 2011
Tanggal : 18 April
Tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PENJABARAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

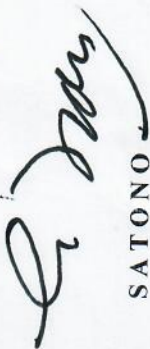
URUSAN PEMERINTAH : 1.01. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2	BELANJA LANGSUNG	70,152,456,000	127,687,365,000	57,534,909,000	82.01	
1 01 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		57,534,909,000	57,534,909,000	100	
1 01 01 16 89	Bantuan Operasional Sekolah		57,534,909,000	57,534,909,000	100	
5 2 1	Belanja Pegawai					
5 2 1 07	Belanja Pegawai (BOS)				100	
5 2 1 07 01	Belanja Pegawai untuk (BOS)		11,506,999,800	11,506,999,800	100	
	- Belanja Pegawai (SD Negeri)		11,506,999,800	11,506,999,800	100	
	- Belanja Pegawai (SMP Negeri)		8,948,935,800	8,948,935,800	100	
			2,558,064,000	2,558,064,000	100	
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa					
5 2 2 28	Belanja barang dan Jasa (BOS)				100	
5 2 2 28 01	Belanja barang dan Jasa (BOS)		29,918,141,000	29,918,141,000	100	
	- Belanja barang dan jasa (SD Negeri)		29,918,141,000	29,918,141,000	100	
	- Belanja barang dan jasa (SMP Negeri)		23,267,233,100	23,267,233,100	100	
			6,650,907,900	6,650,907,900		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 2 3	Belanja Modal					
5 2 3 39	Belanja Modal (BOS)		16,109,768,200	16,109,768,200	100	
5 2 3 39 01	Belanja Modal (BOS)		16,109,768,200	16,109,768,200	100	
	- Belanja Modal (SD Negeri)		12,528,510,100	12,528,510,100	100	
	- Belanja Modal (SMP Negeri)		3,581,258,100	3,581,258,100	100	

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDAKAB.	
2. ASS. I	
3. ASS. II	
4. ASS. III	
5. DP ₂ KAD	
6. BAG. HKM	
7.	
8.	

Sukadana, 18 April 2011
BUPATI LAMPUNG TIMUR


SATONO